

Istri Buronan Judi yang Ditembak, Tunda Laporan ke Komnas HAM

PADANG (IM) - Rencana keluarga korban DG, buron judi yang tewas ditembak polisi, melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sumatera Barat, ditunda. Ditunda karena istri korban masih trauma sehingga belum siap memberikan keterangan kepada Komnas HAM.

"Terpaksa kita tunda dulu sampai istri korban siap memberikan keterangan. Besok atau Selasa kita ke Komnas HAM," kata pengacara keluarga, Guntur Abdurrahman, Minggu (31/1).

Guntur mengatakan akibat korban ditembak di hadapan istri dan anaknya membuat keluarga menjadi trauma. Malahan anak korban mengalami guncangan jiwa dan menyebut ayahnya mati ditembak polisi. Menurut Guntur, peristiwa itu bukan lagi persoalan kesalahan prosedur atau kasus penganiayaan terhadap korban, namun adalah tindakan

pembunuhan sadis di depan keluarga.

"Fakta dan bukti yang ada sama kita jelas terlihat korban tidak melakukan perlawanan. Korban hanya berusaha kabur, namun ditembak dari jarak dekat dengan target kepala korban," kata Guntur.

Guntur mengatakan keluarga ingin mencari keadilan terhadap tewasnya DG sehingga diharapkan polisi profesional mengungkap kasus tersebut.

Sementara, Kabid Humas Polda Sumbang Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan Polda Sumbang telah memeriksa tiga personel Satuan Reserse Kriminal (Sateskrim) Polres Solok Selatan yang menangkap hingga tewasnya buronan kasus judi, DG di Sungai Pagu, Solok Selatan, Rabu (27/1) lalu.

Pemeriksaan dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumbang. ● han

Pukul Petugas Rutan KPK, Nurhadi Dilaporkan ke Polisi

JAKARTA (IM) - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi memukul petugas Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (29/1). Aibatnya, Nurhadi dilaporkan ke polisi.

Kuasa Hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, menyebut kliennya bukan sosok orang yang temperamental, apalagi sampai memukul seseorang. Maqdir malah menaruh curiga adanya provokasi dari oknum di Rutan KPK. Hal itu membuat Nurhadi melakukan pemukulan yang berakibat dirinya dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Justru saya curiga adanya provokasi dari petugas terhadap pak Nurhadi," kata Maqdir, Minggu (31/1).

Maqdir mengaku belum bisa berkomunikasi dengan Nurhadi terkait kasus pemukulan tersebut.

Dibitakan sebelumnya, Nurhadi telah dilaporkan ke polisi oleh petugas rutan KPK lantaran memukul petugas rutan KPK tersebut pada Jumat, 29 Januari 2021.

"Petugas rutan KPK, sebagai pihak korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Setiabudi pada Jumat 29 Januari 2021, sekitar jam 18.30 WIB. Pelaporan didampingi oleh pihak Biro Hukum KPK," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Sabtu (30/1).

Menurut Ali, apapun bentuk tindakan kekerasan, terlebih kepada aparat yang sedang bertugas, adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum.

"Sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak dokter rumah sakit kepada petugas rutan dimaksud. Berikutnya kami tentu menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada pihak yang berwenang," imbuh Ali.

Nurhadi merupakan terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA, yang saat ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung lama KPK, Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



KUNJUNGAN WAMENKES DI SURABAYA

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono (kiri) didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/1). Kehadiran Wamenkes dalam rangka membuka dan meninjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada tenaga kesehatan di Surabaya.

HARLAH KE-95 NU

Jokowi: Mari Dukung Terus NU Perkuat Kehidupan Bangsa

NU dan Muhammadiyah dapat terus bergandengan tangan, merekat kebersamaan dan menjadi garda terdepan memajukan umat dan menjayakan bangsa melalui misi rahmatan lil alamin.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat atas peringatan hari lahir ke-95 Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam video yang disebar Biro Pers dan Media Indonesia (BPMI) Sekretariat Presiden (Setpres), Jokowi mendoakan NU dan warga Nahdliyin di seluruh dunia agar selalu dirahmati dan diberkahi Allah.

"Mari kita dukung terus

Nahdlatul Ulama terus berkontribusi untuk memperkuat kehidupan bangsa Indonesia dan memajukan peradaban dunia, dengan spirit Islam nusantara yang rahmatan lil alamin," ucap Jokowi dalam video tersebut, Minggu (31/10).

Seperti diketahui, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sos-

ial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlulsunna wal Jamaah.

NU yang lahir di masa penjajahan, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan, berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya.

NU sempat menjadi peserta pemilu tahun 1955, dalam pesta demokrasi saat itu NU berhasil dengan meraih 45 kur-

si DPR dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang mendukung Soekarno, dan bergabung dalam NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis). Nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI), Agama Partai Nahdlatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa orde baru Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk 'Kembali ke Khittah 1926' yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi.

Muhammadiyah Umum Pimpinan Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengucapkan selamat. Ia Haedar mengatakan, NU bersama seluruh kekuatan bangsa lebih khusus organisasi Islam yang telah lahir lebih dahulu seperti Serikat Islam, Muhammadiyah, Al Irsyad, Persatuan Islam dan lainnya telah berkhidmat untuk kemajuan dan merekat ukhuwah islamiyah. Dalam per-

jalanan NU bersama Muhammadiyah dan kekuatan nasional lainnya telah berjuang untuk kebangkitan kemerdekaan dan membangun Indonesia.

"Dalam rentan 95 tahun NU telah diakui kehadiran, peran dan kontribusinya untuk merekatkan Indonesia sebagai negara kesatuan sekaligus juga membangun dan memajukan bangsa dan masa depan Indonesia," katanya.

Haedar berharap NU bersama Muhammadiyah sebagai dua pilar Islam terbesar dapat terus bergandengan tangan, merekat kebersamaan dan menjadi garda terdepan memajukan umat dan menjayakan bangsa melalui misi rahmatan lil alamin. NU dengan perspektif Islam Nusantara, telah mengokohkan budaya bangsa dan budaya umat dalam keragaman. NU telah hadir dengan Islam moderat yang membawa pada kemajuan.

"Sinergi antara Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan akan menjadi pilar strategis membangun umat dan bangsa. Insha Allah NU selalu dicintai umat dan bangsa dan bersama kita semua memajukan Indonesia," katanya. ● han

Abu Janda Sudah Sering Dilaporkan, tapi Belum Ada yang Diproses Hukum

JAKARTA (IM) - Polisi diminta memproses hukum pegiat media sosial Permadi Arya atau dikenal Abu Janda. Itu karena masyarakat disebut resah dengan ulah Abu Janda. Apalagi Abu Janda sudah berulang kali dilaporkan ke polisi, tapi belum satu pun yang diproses.

Kasus teranyar, Abu Janda dilaporkan atas komentarnya yang diduga mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) terhadap mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI), Djudju Purwantoro mengatakan, selama ini Abu Janda memang sering membuat kisruh dan kontroversi atas sikap dan komentarnya, terutama ditujukan kepada Ulama dan umat muslim.

Sejak 10 Desember 2019, Djudju Purwantoro sebagai kuasa hukum para pelapor, dengan telapor Abu Janda telah melaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri), antara lain dengan Laporan Polisi : Nomor LP/B/1037/XII/2019/Bareskrim.

Saat itu, kata dia, Abu Janda dilaporkan atas ujaran kebencian berdasar SARA, dan penistaan agama diduga

melanggar pasal 45A (ayat 2) Jo pasal 28 (ayat 2) UU No 19 tahun 2016 tentang ITE, dan atau pasal 156 KUHP. Kata-kata Abu Janda yang dilontarkan pada waktu itu antara lain "teroris punya agama dan agamanya adalah Islam."

"Para saksi sejak akhir Mei 2020 juga sudah diperiksa oleh Bareskrim," ucapnya.

Ia mengatakan, Abu Janda sudah sering dilaporkan oleh umat karena tidak jera juga berubah melakukan ujaran kebencian, penghinaan, dan atau penistaan terhadap agama Islam melalui media sosial.

"Faktanya sampai saat ini tidak satupun laporan polisi tersebut yang ditindak lanjuti atau diproses hukum, tuturnya.

Ia pun berharap, Kapolri baru Jenderal Listyo Sigit dapat menegakkan hukum yang adil dalam kasus ini.

"Sesuai harapan masyarakat dengan pernyataan dan komitmennya yaitu, hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, cuitan Permadi atau yang biasa dikenal Abu Janda yang dimaksud Media adalah menyebut kata evolusi kepada Natalius Pigai. Menurutnya, hal itu menyinggung dan telah menyebarkan ujaran kebencian berbau SARA. ● mei



IDN/ANTARA

BANTUAN KORBAN GEMPA SULBAR

Sejumlah Prajurit TNI AL mengangkut logistik untuk korban gempa Sulbar dari atas KRI Banda Aceh-593, di dermaga Lanal Mamuju, Sulawesi Barat, Minggu (31/1). Sebanyak 150 ton bantuan untuk korban gempa Majene-Mamuju yang diangkut menggunakan KRI Banda Aceh-593 tiba di Mamuju dan siap disalurkan ke tempat pengungsian.

Gerindra Dukung Pilkada Serentak Berbarengan dengan Pilpres 2024

JAKARTA (IM) - Partai Gerindra mendukung penyelenggaraan pilkada serentak pada 2024 agar berbarengan dengan pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pilkada serentak pada 2024 dan meniadakan pilkada serentak 2022 dan 2023 mengacu pada Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dengan demikian Gerindra menilai tak perlu ada pilkada serentak pada 2022 dan 2023 yang sedianya dihelat oleh beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani melalui keterangan tertulis, Minggu (31/1).

"Partai Gerindra merasa konsistensi dalam menyelenggarakan pemilihan umum pada pola demokrasi yang berkualitas haruslah menjadi komitmen bersama. Gerindra berpikir agar UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi landasan pemilu di 2019 sebaiknya tetap dipertahankan," kata Muzani.

Ia mengungkapkan dalam sejarah demokrasi langsung sejak dilaksanakan pemilu pasca reformasi 1999, In-

donesia selalu mengalami perubahan tentang sistem pemilu setiap lima tahun berikutnya perubahan itu selalu terjadi. Perubahan itu mencakup sistem penghitungan suara, sistem pemilu apakah akan terbuka atau tertutup, threshold yang selalu naik, sampai konversi suara menjadi kursi, dan dapil yang juga selalu bertambah.

"Ini yang menyebabkan kemudahan membuat pola pemilihan Umum tidak pernah Ajeg dan tidak pernah bisa dilakukan perbaikan kualitas nya karena sistem nya selalu berubah. Partai politik selalu menyesuaikan dengan UU yang baru setiap lima tahun," ujar Muzani.

Lebih lanjut, Ahmad Muzani menyebutkan segenap komponen bangsa perlu mulai berpikir bagaimana sinergi KPU, Bawaslu, dan DKPP yang berkualitas haruslah menjadi komitmen bersama. Gerindra berpikir agar UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi landasan pemilu di 2019 sebaiknya tetap dipertahankan," kata Muzani.

Selain itu, ia menilai pembahasan revisi Undang-undang N0. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk memajukan ketentuan penyelenggaraan pilkada serentak pada 2022 dan 2023 tidak mendasak saat ini. ● mei



IDN/ANTARA

JUMLAH NAKES YANG SUDAH DIVAKSIN

Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac saat pelaksanaan vaksinasi massal untuk tenaga kesehatan (Nakes) di RSUP Dr.M.Dijamil Padang, Sumatera Barat, Minggu (31/1). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sampai Sabtu (30/1/2021), pemerintah telah melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap 482.145 tenaga kesehatan (nakes) dari 1.530.308 orang yang ditargetkan pada tahap pertama proses vaksinasi.

Wakil Ketua MPR Bicara Soal Alasan Pilkada 2022 Diundur, Warganet Sebut Anies

JAKARTA (IM) - Waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2022 dan 2023 masih berpolemik. Apabila digelar pada 2024 bersamaan dengan Pemilihan Presiden, dinilai akan menyebabkan disabilitas politik dan keamanan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid melalui akun twiternya @hnuurwahid, Minggu (31/1). Menurutnya, dengan alasan adanya Covid-19 untuk memundurkan Pilkada Serentak 2022 dan 2023, pemerintah tidak konsisten lantaran pada 2020 pilkada serentak tetap dilaksanakan meski Covid-19 terus menyebar.

"Sekalipun covid-19 terus menyebar, pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan. Alasannya al agar tak terjadi KepalaDaerah yg Plt. Nah kalau Pilkada 2022&2023 diundur ke 2024, justru bisa terjadi disabilitas politik dan keamanan. Kren akan ada ratusan KepalaDaerah yg Plt," tulis @hnuurwahid yang dikutip Minggu (31/1).

Tulisan politisi PKS itu dibuat untuk membalas salah satu berita di media nasional yang beniskan berita dari Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Dia mengatakan bahwa stabilitas politik dan keamanan yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi sehingga menginginkan agar Pilkada tetap digelar pada 2024.

Beragam komentar ● mei

POWER AUCTION **LELANG OTOMOTIF**

PT. POWER ASEITINDO SELARAS melalui Pejabat Lelang Kelas II wilayah DKI Jakarta akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Sukuotomotif atas barang bergerak berupa RATUSAN UNIT MOBIL & RATUSAN UNIT MOTOR yang terdiri dari berbagai merk dan tipe, pada:

OPEN HOUSE			LELANG		
HARI	TANGGAL	WAKTU	HARI	TANGGAL	WAKTU
SABTU - MINGGU	06 - 07 FEBRUARI 2021	09.00 - 17.00 WIB	SENIN	08 FEBRUARI 2021	11.00 s.d Selesai
SABTU - MINGGU	13 - 14 FEBRUARI 2021	09.00 - 17.00 WIB	SENIN	15 FEBRUARI 2021	11.00 s.d Selesai
SELASA - RABU	23 - 24 FEBRUARI 2021	09.00 - 17.00 WIB	KAMIS	25 FEBRUARI 2021	11.00 s.d Selesai

LOKASI
Jl. RC. Veteran No.3, Bintaro, Pesanggrahan - Jakarta Selatan

SYARAT & KETENTUAN LELANG :

- Peminat LELANG MOBIL & MOTOR diwajibkan menyertakan uang jaminan sebesar: Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 NPL MOBIL Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 NPL MOTOR
- Kondisi kendaraan yang akan dilelang adalah sebagaimana adanya ("as is")
- Uang jaminan dan pelunasan disetorkan ke rekening a/n PT. Power Asetindo Selaras A/C no. 510999971 di BCA cab. Kwi Carings, Jakarta Pusat
- Apabila Pelunasan tidak terpenuhi dalam jangka waktu 5 (LIMA) hari setelah lelang, maka pemenang lelang dinyatakan wapresstasi dan uang jaminan akan hangus
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Power Asetindo Selaras, tel: 0857 7606 6668 (Taufik) atau melalui email: taufik.hidayat@power-auktion.co.id

Jakarta, 1 Februari 2021
PANITIA LELANG